

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Gambaran Umum Organisasi

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi – institusi sosial. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;

4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas dan ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Adapun Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

Table 1.1
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SMP	-
3	SLTA	8
4	D1-D3	1
5	S1	19
6	S2	5
JUMLAH		33

Tabel 1.2
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

	Golongan														
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Jumlah Personil							4	5		2	1	13	6	1	1

Table 1.3
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	21
2	Pelaksana	12
Jumlah		33

Table 1.4
SDM Menurut Jenis Kelamin

No	Unit kerja	Laki – laki	perempuan	Total
1	Dinsos PPKB	19	14	33

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Table 1.5
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan kantor	Baik	11 unit
2	Bangunan Gedung kantor permanen	Baik	28 unit
3	Bangunan Tempat kerja lain	Baik	3 unit
4	Mobil	Baik	5 unit
5	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Baik	2 unit
6	Mobil Pengangkut aseptor KB	Baik	1 unit
7	Mobil Khusus lainnya	Baik	3 unit
8	Kendaraan roda dua dinas	Baik	188 unit
9	Mesin Ketik manual Portable	Baik	17 unit
10	Mesin ketik manual standar	Baik	1 buah
11	Mesin ketik manual longewage	Baik	2 buah
12	Lemari Besi	Baik	1 buah
13	Rak Besi/Metal	Baik	26 buah
14	Filling Besi/Metal	Baik	14 buah
15	Brankas	Baik	1 buah
16	Lemari Kaca	Baik	9 buah
17	Papan Visuil	Baik	30 buah
18	Papan Nama Instansi	Baik	4 buah
19	White Board	Baik	26 buah

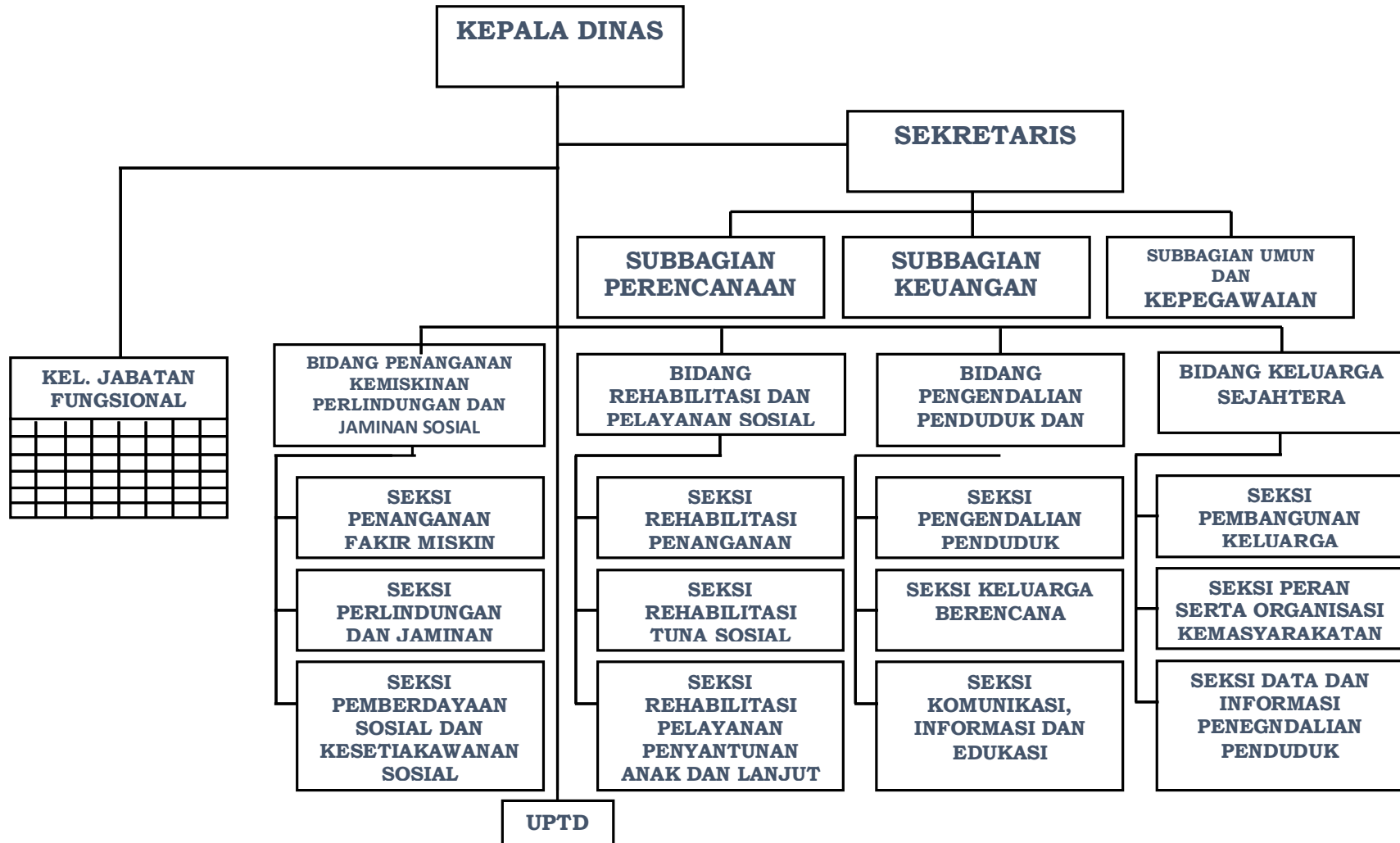
20	LCD	Baik	34 buah
21	Lemari Kayu	Baik	36 buah
22	Meja Kayu/Rotan	Baik	2 buah
23	Meja kayu/Rotan/Bambu	Baik	2 buah
24	Meja Rapat	Baik	7 buah
25	Meja Tulis	Baik	13 buah
26	Meja Telepon	Baik	1 buah
27	Meja Tambahan	Baik	1 buah
28	Kursi Rapat	Baik	395 buah
29	Kursi Tamu	Baik	30 buah
30	Kursi Putar	Baik	25 buah
31	Kursi Lipat	Baik	1 buah
32	Meja Komputer	Baik	4 buah
33	Tenda	Baik	1 buah
34	Meja Biro	Baik	61 buah
35	Sofa	Baik	5 buah
36	Mesin Potong Rumput	Baik	1 buah
37	Lemari ES	Baik	1 buah
38	AC Unit	Baik	28 buah
39	Kipas Angin	Baik	86 buah
40	Exhaust Fan	Baik	78 buah
41	Kompor gas	Baik	2 buah
42	Kitchen Set	Baik	1 buah
43	Tabung Gas	Baik	2 buah
44	Televisi	Baik	7 buah
45	Sound System	Baik	31 buah
46	Alat Rumah Tangga lain lain	Baik	12 buah
47	VCD Player	Baik	1 buah
48	P.C Unit	Baik	34 Unit
49	Lap Top	Baik	25 Unit
50	Note Book	Baik	84 Unit
51	Printer	Baik	62 Unit
52	Router	Baik	3 Unit
53	Smart Phone	Baik	65 unit
54	Computer Bicara	Baik	1 unit

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan

Bupati Kebumen Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta Tata kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas membawahi:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian keuangan
 - Sub bagian Perencanaan
- Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
- c. Bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial
 - Seksi penanganan fakir miskin
 - Seksi perlindungan dan jaminan sosial
 - Seksi pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan
 - d. Bidang Rehabilitasi dan pelayanan sosial
 - Seksi rehabilitasi penyandang disabilitas
 - Seksi rehabilitasi tuna sosial
 - Seksi rehabilitasi pelayanan, penyantunan anak dan lanjut usia
 - e. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Seksi pengendalian penduduk
 - Seksi keluarga berencana
 - Seksi komunikasi, informasi, dan edukasi
 - f. Bidang keluarga sejahtera
 - Seksi pembangunan keluarga
 - Seksi peran serta organisasi kemasyarakatan
 - Seksi data dan informasi pendalian penduduk

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”* dengan melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui misi yaitu Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat dan Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Adapun dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk di kabupaten Kebumen, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan strategi :

1. Pendampingan dan perlindungan sosial;
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial;
3. Penguatan kapasitas dan motivasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS;

4. Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan;
5. Perlindungan dan jaminan sosial;
6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan pelayanan KB di kecamatan;
10. Cakupan pelayanan KB aktif;
11. Pemberdayaan kader kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL).

Sedangkan dalam pelaksanaan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di arahkan kepada :

1. Perlindungan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat)
3. Pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial
4. Penguatan kapasitas PSKS guna mendukung penanganan PMKS serta meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan
5. Penyediaan logistic dan dapur umum bagi korban bencana alam dan bencana sosial, pengerahan anggota TAGANA di lokasi bencana serta penyiapan TAGANA yang tangguh.
6. Fasilitasi koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah
7. Pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan, dan profesional
9. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS

Adapun kebijakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

- 2) Peningkatan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga

1.3 Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama masih minimnya jumlah PLKB dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Integrasi penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan secara menyeluruh yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS;
- d. Belum optimal atau belum validnya Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sementara permasalahan utama yang dihadapi Dinsos PPKB dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Jumlah tenaga petugas Keluarga Berencana (PKB) yang tidak ideal, 1 PKB mengampu lebih dari 4 desa.
2. Belum semua pasangan usia subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.

a. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, Visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Argobisnis”

Dan dari empat Visi yang akan dilaksanakan dalam RPJPD yang meliputi: (1) mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2) membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta (4) memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan rakyat; maka misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial Kabupaten Kebumen adalah Misi kedua dan Misi keempat untuk menunjang visi Bupati Kebumen yaitu:

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”

Berdasarkan Visi Bupati Kebumen maka ditetapkan Misi Bupati Kebumen

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mendukung Misi

Dua

“Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat”

Empat

“Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan”

Untuk mendukung visi dan misi Bupati tersebut maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

b. Tujuan

Pembentukan visi dan misi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yakni sebagai beriku :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Mengendalikan angka kelahiran sebagai upaya untuk Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera
5. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Optimal

c. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang cacat;
3. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS Jalananan;
4. Meningkatnya pelayanan terhadap keluarga miskin;
5. Meningkatnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana alam/ sosial;
7. Meningkatnya penanganan terhadap lanjut usia dan anak terlantar dalam dan luar panti;
8. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Keluarga Sejahtera;
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB;

10. Meningkatnya keperdulian masyarakat tentang KB melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja OPD sesuai Renstra 2016-2021
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase (%) PMKS terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Meningkat dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS	30%	0		10%	10%	20%	20%	20%	20%
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70%	90%		60%	65%	70%	74%	80%	90%
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB	87%	90%		80%	82%	85%	87%	89%	89%
5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	1%		1,21%	1,24%	1,28%	1,32%	1,37%	1,37 %
6	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	65%	77%		77,65%	78,00%	78,84%	79,45%	80,75%	80,75 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	5%	5%		12%	11,15%	8,35%	6,15%	5%	5%
8	Rasio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap desa / kelurahan	1 orang	1 orang		1 org / desa	1 org / desa	1 org / desa	1 org / desa	1 org / desa	1 org / desa
9	Rasio Petugas Lapangan KB (Penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa	2 desa	2 desa		6 desa	5 desa	4 desa	3 desa	2 desa	2 desa
10	Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 %	30 %		0,50%	1,00%	1,10%	1,85%	2,00%	2,00 %
11	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	80%	90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 berikut Penetapan

Kinerja Perubahan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Sebelum Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase (%) Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat Daerah	92 % B
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1. cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	59,43 %
3.	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	1. Cakupan peserta KB Aktif 2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	84,90 % 32,24%

Sedangkan Program dan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2019

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 660.260.000	Rp 680.128.000	Rp 19.868.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 264.894.000	Rp 471.237.000	Rp 206.343.000
3.	Program Keluarga Berencana	Rp 11.054.515.000	Rp 11.013.319.000	Rp (41.196.000)

4.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Rp 11.246.196.000	Rp 11.047.563.000	Rp (198.633.000)
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 41.588.000	Rp 41.588.000	0
6.	Program penciptaan iklim usaha kecil Menengah yang konduksif	Rp 228.736.000	Rp 228.736.000	0
7.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Rp 54.461.000	Rp 54.461.000	0
8.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Rp 9.902.000	Rp 9.902.000	0
9.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 794.635.000	Rp 839.635.000	Rp 45.000.000
10.	Program Pelayanan dan Kontrasepsi	Rp 321.243.000	Rp 321.243.000	0
11.	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	Rp 465.394.000	Rp 665.394.000	Rp 200.000.000
12.	Program Pembinaan Panti asuhan/jompo	Rp 415.884.000	Rp 615.884.000	Rp 200.000.000

13.	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	Rp 207.942.000	Rp 207.942.000	0
14	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp 128.726.000	Rp 128.726.000	0
15.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 447.074.000	Rp 447.074.000	0
16.	Program Penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga	Rp 345.059.000	Rp 345.059.000	0
17.	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp 311.913.000	Rp 311.913.000	0
18.	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Rp 15.843.000	Rp 15.843.000	0
	TOTAL	Rp 27.014.265.000	Rp 27.445.647.000	Rp 431.382.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegal-an dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah di tetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	kurang

Agar dapat dilakukan pengukuran kinerja maka dibutuhkan data kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang

dilaksanakan berupa indikator output maupun indikator outcome yang dapat direalisasikan dari masing masing program dan kegiatan. Data kinerja dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang bersumber dari:

- Laporan Target, Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019;
- Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019;
- LKjIP Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019;
- Hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Data terkumpul kemudian disusun dan diolah menjadi data kualitatif maupun kuantitatif dari indikator kinerja suatu sasaran strategis maupun indikator kinerja utama dari sasaran.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2018). Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2019) dan DPA Perubahan tahun 2019. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dan DPA Perubahan 2019.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan 4 (empat) skala pengukuran dengan rumus dan kategori sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksudkan maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja tahun 2019

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Sosial dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kebumen tahun 2019

Indikator kinerja	Satuan	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capaian tahun 2019
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	16,16	70,65	437,19
Cakupan Peserta KB aktif	%	84,90	71,41	84,11
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	32,15	53,02	164,91

Secara umum capaian kinerja sebagai besar indikator tercapai sebesar 228,73% atau kategori sangat baik. Untuk indikator persentase penanganan PMKS tercapai 437,19%. Sementara itu untuk capaian indikator persentase cakupan peserta KB Aktif tercapai 84,11% dan indikator persentase pembinaan keluarga sejahtera tercapai 164,91%.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2019 sebesar 450.840 jiwa.

Hal ini terjadi karena tercapainya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program BPNT 435.496 jiwa, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 12.042 jiwa, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar 1.982 jiwa, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 70 jiwa, dan program pembinaan panti asuhan / panti jompo sebesar 1.250 jiwa.

Anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis telah dialokasikan sebesar Rp 34.573.211.000 terealisasi sebesar Rp 28.424.871.293 (82,22%).

Program pendukung sasaran strategis antara lain :

- 1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;
- 4) program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 5) program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 6) program pembinaan panti asuhan / panti jompo;
- 7) program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- 8) program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 9) program penataan administrasi kependudukan;
- 10) program keluarga berencana;
- 11) program pelayanan kontrasepsi;
- 12) program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- 13) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain :

1. Melakukan program pembinaan keluarga khususnya melalui family development session di kegiatan program keluarga harapan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data kesmiskinan melalui DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial);
3. Agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetap berlanjut dilakukan pendampingan baik secara manajemen maupun teknis;
4. Guna optimalkan program gulkin dilaksanakan pemberian bantuan KUBE sesuai data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial);

5. Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tidak sebanding dengan promosi 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampu 3-4 desa;
6. Belum semua PUS (pasangan usia subur) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB;
7. Minimnya anggaran dalam rangka KIE pelayanan KB;
8. Belum adanya produk hukum terkait dukungan anggaran kampung KB;
9. Belum maksimalnya advokasi kepada lintas sektor terkait, pemangku kepentingan terkait dengan pengalokasian anggaran guna mendukung kampung KB;
10. Kurangnya tenaga PLKB saat ini hanya ada 50 orang PLKB menangani 460 desa;
11. Terbatasnya SDM kader, banyak kader yang sudah tua dan gagap teknologi;
Alternative solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala
 - 1) Adanya basis data kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
 - 2) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
 - 3) Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pelayanan KB dilaksanakan secara gratis;
 - 4) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB di masing – masing lokasi kampung KB di 26 kecamatan. Pemetaan, analisa masalah, sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;

- 5) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 6) Mengusulkan penambahan PLKB ke BKKBN;
- 7) Melakukan peremajaan kader PPKBD sebanyak 460 dan sub PPKBD sebanyak 2.187;
- 8) Pembinaan terhadap kader institusi masyarakat pedesaan;
- 9) Peningkatan kualitas hidup manusia melalui kelompok UPPKS dengan jumlah sampai dengan tahun 2019 sebanyak 508 kelompok yang tersebar di 26 kecamatan;
- 10) Dilakukan verifikasi dan validasi data terpadu antara data DTKS dengan mengoptimalkan peran TSKS, Pendamping PKH, dan kader PPKBD dan sub PPKBD;
- 11) Menyusun Raperda Perlindungan Disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas.

2. Perbandingan capaian kinerja cakupan penanganan PMKS tahun 2018 dan 2019

Tabel 3.3

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui cakupan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2018 dibanding dengan tahun 2019

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capaian kinerja
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	16,13	67,25	16,16	70,65	437,19

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Cakupan Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2018 dibanding dengan tahun

2019 memperoleh capaian kinerja 437,19%. Pada tahun 2018 dengan target 16,13% terealisasi sebesar 67,25% dan pada tahun 2019 dengan target 16,16% terealisasi sebesar 70,65%.

Angka ini diperoleh dari jumlah PMKS yang ditangani Sejumlah 450.848 jiwa dibagi jumlah PMKS dalam DTKS sejumlah 638.092 jiwa. Kenaikan capaian kinerja ini disebabkan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai bagi 108.675 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan 66.881 KK, Program pemberdayaan Fakir miskin melalui KUBE sebanyak 280 KUBE (2988 KK)

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun rincian Jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Status PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

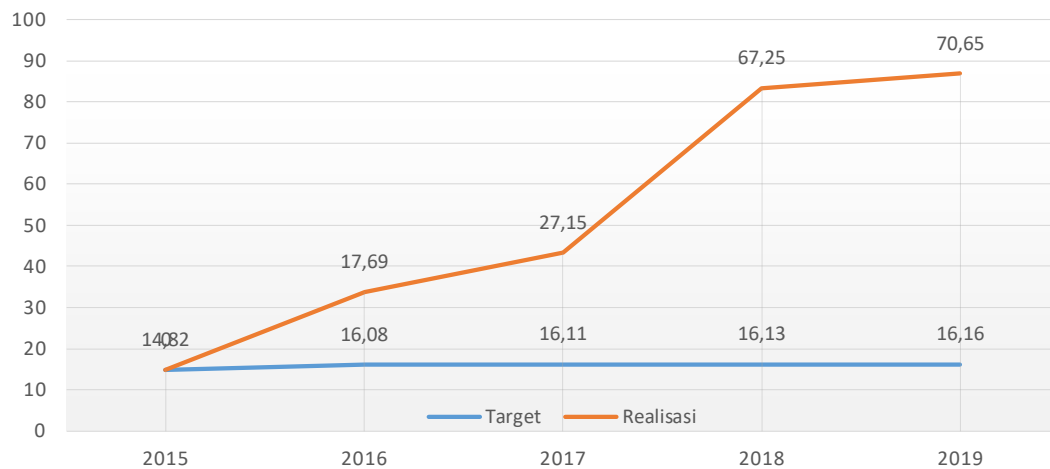
DATA PMKS		
Kube Kambing	8.272	DTKS (Ruta)
Kube E-Warong	1.440	
Kube Ayam Petelur	520	
Kube dll	1.720	
WRSE	20	

Lanjut Usia	70	
Anak Jalanan	140	
Dosaraso	42	
Eks Penyakit Sosial	70	
Anak Cacat	400	
Eksodan WAMENA	20	
Korban bencana kebakaran	76	
Korban Bencana Alam	1.304	
Panti Asuhan	1.250	
BPNT	435.496	
Jumlah	450.840	638.092

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

Dari data diatas dapat diketahui jenis data DTKS (Rumah Tangga) mencapai 638.092 dan data PMKS Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendapatkan bantuan sejumlah 450.840. Kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen teralisasi 70,65%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan Penanganan PMKS sebesar 437,19. Hal ini disebabkan adanya program nasional Bantun Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan, dan program penangan PMKS lain baik yang bersumber dana APBN, APBD Prov maupun APBD Kabupaten.

Grafik 3.1
Grafik Cakupan Penanganan PMKS



2. Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Tabel 3.5

Target Capaian IKU Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran (IKU Kabupaten)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,26	18,05	17,74	16,98	16,22	15,45

Table 3.6

Realisasi capaian IKU Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran (IKU Kabupaten)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,86	19,60	17,47	16,82	-	-

Grafik 3.2
Realisasi indikator kinerja utama (IKU) Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen yang mendukung IKU Daerah dalam RPJMD 2016-2021



3. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2018 dan 2019

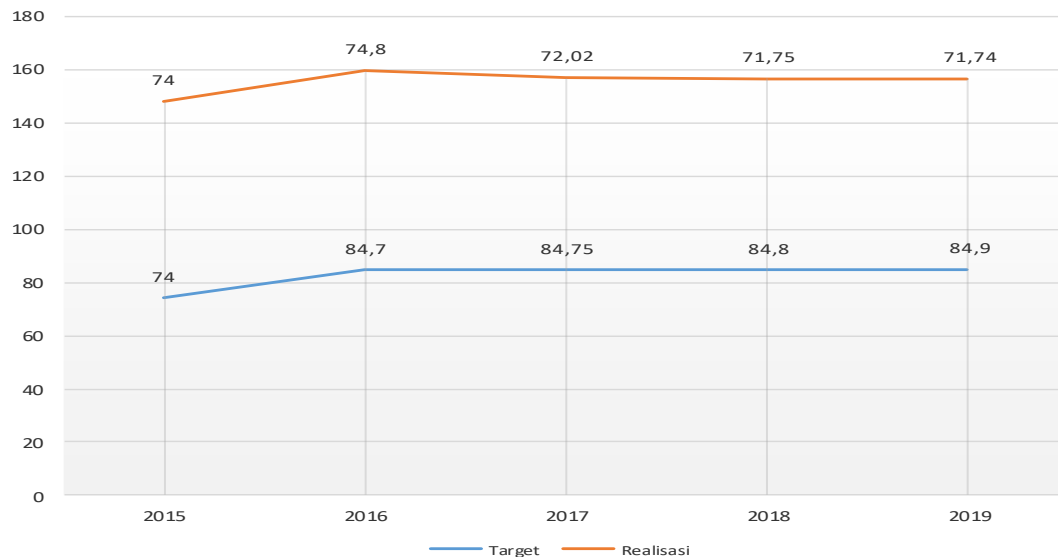
Tabel 3.7
Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui cakupan peserta KB aktif tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	capaian
Persentase cakupan peserta KB aktif	%	84,80	71,75	84,90	71,41	84,11

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan peserta KB aktif tahun 2019 menunjukkan memperoleh capaian angka 84,11%, pada tahun 2018 dengan target 84,80% dengan realisasi 71,75% sedangkan target tahun 2019 sebesar 84,90% dengan realisasi 71,41%. Indikator kinerja ini tidak tercapai karena kesalahan pentargetan di awal tahun Rentra. Pentargetan melampaui target Nasional, dimana

tahun 2019 ini hanya 71,41% jika dibanding dengan target nasional kita sudah melampaui target.

Grafik 3.3
Grafik Cakupan Peserta Kb Aktif



Capaian program pembangunan daerah yang berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Nama program / indicator kinerja	Target kinerja akhir periode RPJMD	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	OPD penanggu ngjawab	Penilaian
1	Program keluarga berencana					
a	Peningkatan pelayanan KB di kecamatan	100	71,42	71,37	Dinsos ppkb	•

2	Program Pelayanan Kontrasepsi						
	b	Cakupan pelayanan KB aktif	85,50	71,41	85,5	Dinsos ppkb	•
3	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga						
	c	Pemberdayaan kader kelompok tribina	585	130	130	Dinsos ppkb	•

Dari table diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran urusan Meningkatnya keberdayaan masyarakat. Secara umum hamper semua indikator kinerja program yang melekat di Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen ditahun 2019 dapat terealisasi. Sedangkan yang tidak mencapai target adalah program keluarga berencana, adapun penyebab masalahnya adalah jumlah personil tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yang tidak ideal, 1 Penyuluh KB mengampu 4 Desa. Dan belum semua pasangan usia subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut terlihat dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan pembinaan Keluarga Sejahtera tahun 2018 dan 2019

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut :

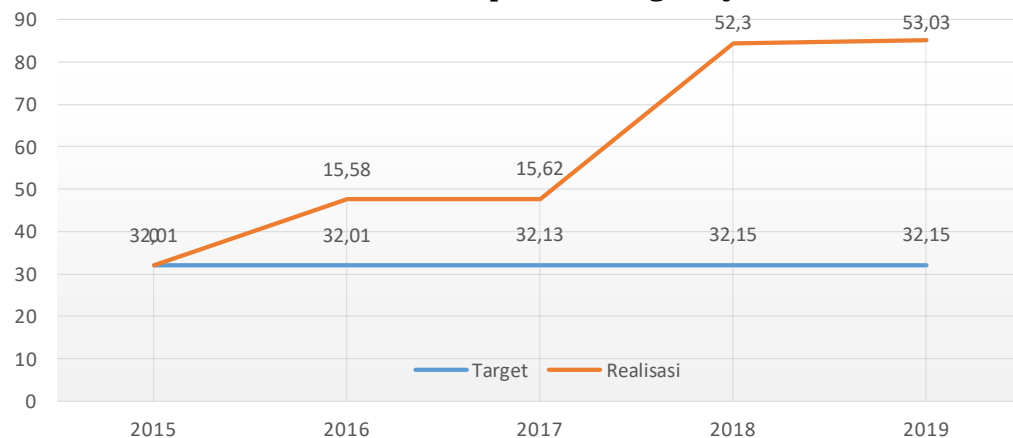
Tabel 3.9

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capaian 2019
Persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	32,15	52,30	32,15	53,02	164,91

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2019 memperoleh capaian 164,91%. Pada tahun 2018 dengan target 32,15% dapat mencapai realisasi sebesar 52,30% sedangkan di tahun 2019 dengan target 32,15% terealisasi 53,02%. Realiasi capaian kinerja sebesar 53,02% di peroleh dari jumlah anggota UPPKS ditambah jumlah anggota Tribina di bagi jumlah Keluarga di kali 100%. Realisasi Capaian kinerja ini melebihi target sebesar 20,87% dari target sebesar 32, 15% di karenakan jumlah anggota UPPKS yang bertambah secara signifikan.

Grafik 3.4
Cakupan Keluarga Sejahtera



5. Capaian kinerja urusan

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA URUSAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA 2019		TARGET AKHIR RPJMD
			T	R	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	71,75	84,90	71,41	85,90
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	52,3	32,15	53,02	32,27

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penyelenggaraan Program KB selain ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama dalam pelayanan KB adalah dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi.

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2019 sebesar angka 84,90 %. Realisasi 2019 sebesar 71,41 % diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 141.438 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 198.052 jiwa. Realisasi tahun 2019 tidak mencapai target karena target yang di tetapkan terlalu tinggi

yaitu sebesar 84,90%, sedangkan target Nasional sebesar 61%. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2019

NO.	URAIAN KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	2,7	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	155.134	155.134	154.502	141.693	141.808
	a. Laki-Laki	5.115	5.115	5.455	5.017	5.847
	b. Perempuan	150.019	150.019	149.047	13.586	135.961
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	214.553	208.841	206.543	199.672	198.546
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	155.134	154.502	141.693	141.808

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan.

2. Cakupan Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Capaian kinerja cakupan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar angka 164,91%. Atau dengan kata lain Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 53,20% sementara target yang ditetapkan 32,15%. Persentase ini dihitung dari jumlah anggota kelompok UPPKS ditambah jumlah anggota kelompok Tribina sebesar 195.302 jiwa dibagi jumlah keluarga sebesar 368.297 jiwa. Target kinerja ini tercapai melalui program tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita, BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan program usaha kecil menengah kegiatan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera,

baik Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

Table 3.12
Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen
Tahun 2019

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1.	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	49.079
2.	Tahapan Keluarga Sejahtera I	219.738
3.	Tahapan Keluarga Sejahtera II	99.177
4.	Tahapan Keluarga Sejahtera III	-
5.	Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus	-
	Total	367.994

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen 2020

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain.

➤ Permasalahan

- 1) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tiak sebanding dengan promosi 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampung 3-4 desa;
- 2) Belum semua PUS (pasangan usia subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB;
- 3) Sebagian besar masyarakat masih mengharapkan program KB dilaksanakan gratis;
- 4) Minimnya anggaran dalam rangka KIE pelayanan KB;
- 5) Belum adanya produk hukum terkait dukungan anggaran kampung KB;
- 6) Belum maksimalnya advokasi kepada lintas sector terkait, pemangku kepentingan terkait dengan pengalokasian anggaran guna mendukung kampung KB;
- 7) Kurangnya tenaga PLKB saat ini hanya ada 50 orang PLKB menangani 460 desa;

- 8) Terbatasnya SDM kader , banyak kader yang sudah tua dan gagap teknologi.

Solusi yang ditempuh di tahun 2019 untuk penanganan hambatan yaitu:

➤ Solusi

- 1) Adanya basis data kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 2) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 3) Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pelayanan KB dilaksanakan secara gratis;
- 4) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB di masing – masing lokasi kampung KB di 26 kecamatan. Pemetaan, analisa masalah, sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 5) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 6) Mengusulkan penambahan PLKB ke BKKBN;
- 7) Melakukan peremajaan kader PPKBD sebanyak 460 dan sub PPKBD sebanyak 2.187;
- 8) Pembinaan terhadap kader institusi masyarakat pedesaan;
- 9) Peningkatan kualitas hidup manusia melalui kelompok UPPKS dengan jumlah sampai dengan tahun 2019 sebanyak 508 kelompok yang tersebar di 26 kecamatan;
- 10) Dilakukan verifikasi dan validasi data terpadu antara data BDT, data PMKS dengan mengoptimalkan peran TKSK, PKH, dan kader PPKBD dan sub PPKBD.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2019, didukung dengan anggaran sebesar Rp 34.573.211.000, dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung Rp 7.127.564.000,-
2. Belanja langsung Rp 27.445.647.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 680.128.00	Rp 623.929.751	91,74%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 471.237.000	Rp 453.783.000	98,30%
3.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Rp 11.047.563.000	Rp 10.096.919.092	91,39%
4.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp 839.635.000	Rp 647.402.145	77,11%
5.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 665.394.000	Rp 618.217.459	92,92%
6.	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Rp 615.884.000	Rp 589.832.724	95,77%
7.	Program	Rp 207.942.000	Rp 177.223.717	85,23%

	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
8.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp 447.074.000	Rp 434.517.934	97,19%
9.	Program penataan administrasi kependudukan	Rp 41.588.000	Rp 36.607.700	88,02%
10.	Program keluarga berencana	Rp 11.013.319.000	Rp 9.069.153.362	82,35%
11.	Program pelayanan kontrasepsi	Rp 321.243.000	Rp 170.709.552	53,14%
12.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp 128.726.000	Rp 122.877.504	95,46%
13.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Rp 345.059.000	Rp 320.434.100	92,86%
14.	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	Rp 228.736.000	Rp 220.628.064	96,46%
15.	Program pengembangan data/informasi	Rp 9.902.000	Rp 9.871.700	99,69%

	/ statistik			
16.	Program pengembangan data/ informasi	Rp 54.461.000	Rp 51.830.000	95,17%
17.	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp 311.913.000	Rp 301.560.530	96,68%
18.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp 15.843.000	Rp 9.688.000	61,15%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2019 mencapai Rp 23.955.240.534,- atau sebesar 87,28%. Adapun penyumbang rendahnya penyerapan anggaran adalah Program Pelayanan Kontrasepsi yang persentase penyerapannya 53,14 %, dikarenakan terjadi pemutusan kerjasama dengan RS swasta yang disebabkan tidak tercukupinya dana operasional pelaksanaan MOW (KB Medis Operasi Wanita), serta serapan pada Program Keluarga Berencana yang prosentasenya hanya sebesar 82,35 %, dikarenakan banyaknya pertemuan di lapangan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya SDM Petugas Keluarga Berencana serta juknis DAK yang tidak bisa diterapkan pada APBD Kabupaten Kebumen.

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan bidang Keluarga Berencana pada masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara optimal sebagaimana dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan berbagai uraian dan beberapa data yang telah disampaikan, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

- 1) Pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU Kabupaten), indikator angka kemiskinan belum mencapai target tetapi pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen mencapai 16,82% dari target 16,98%, mengalami penurunan sebesar 0,16% dibanding tahun 2018.
- 2) Evaluasi kinerja keuangan dari 18 Program 46 kegiatan sebesar 91,30% masuk dalam kategori pencapaian 90-99,99%, sedangkan 8,69% masuk dalam kategori pencapaian kurang dari <90%

- 3) Total penyerapan anggaran APBD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar Rp 28.424.871.293 atau 82,22% dari total APBD sebesar Rp 34.573.211.000, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 18.357.307.528 atau 77,75% mengalami kenaikan sebesar 4,47%.

4.2 PERMASALAHAN / KENDALA

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tusi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya dijumpai berbagai macam permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala yang dihadapkan dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2019, antara lain:

- 1) Data DTKS yang belum valid;
- 2) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tidak sebanding, rata-rata 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampu 3-4 desa, 50 petugas PLKB mengampu 460 Desa;
- 3) Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB

4.3 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa mendatang antara lain :

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);

- 2) Agar KUBE tetap berlanjut dilakukan pendampingna baik secara manajemen maupun teknis;
- 3) Guna optimalkan program gulkin dilaksanakan pemberian bantuan KUBE sesuai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 4) Adanya basi data kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 5) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 6) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB dimasing-masing lokasi kampung KB di 26 Kecamatan. Pemetaan analisa masalah sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 7) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 8) Mengusulkan penambahan PLKB ke BBKBN.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2019 dari OPD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dating.

Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001